



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon. 3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

- Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Februari 2015
- Waktu : 09.00 - 12.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Graha Sawala, Gedung A.A. Maramis II
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda : 1. Persetujuan studi ruang lingkup laporan EITI Indonesia 2012 – 2013.
2. Perkembangan Kegiatan dan Rencana Kerja EITI Indonesia Tahun 2015.
- Peserta Rapat : Rapat dihadiri oleh seluruh wakil anggota Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Ketua Dewan EITI Internasional (Ms. Clare Short), Direktur Regional Sekretariat EITI Internasional, dan wakil dari Bank Dunia (daftar hadir terlampir).

A. Pembukaan

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bpk. Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.
2. Hal yang disampaikan adalah:
 - Penjelasan mengenai agenda rapat yaitu (1) Pemaparan Ernst & Young mengenai progres perbaikan studi ruang lingkup laporan EITI Indonesia 2012 – 2013, dan untuk bisa disetujui Tim Pelaksana sebagai acuan bagi Administrator Independent menyusun Laporan EITI Indonesia 2012-2013; (2) Persiapan penyusunan Laporan EITI 2012 – 2013; (3) Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) No.26 Tahun 2010 dan kemajuan proses pengadaan Administrator Independent.
 - Memberikan kesempatan kepada Clare Short untuk menyampaikan sambutan serta beberapa hal dari hasil pertemuan sebelumnya dengan Menteri ESDM.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Clare Short adalah
 - Hasil pertemuan dengan Menteri ESDM tanggal 5 Februari 2015, kontak pertelpon dengan Menko Perekonomian, serta hasil dari “*Public Forum*” yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia dengan tema “Tantangan dalam Transparansi Penerimaan Sektor Industri Ekstraktif di era Pemerintahan Indonesia yang baru”.

- Tantangan bagi EITI Indonesia ke depan adalah untuk tidak terpaku sekedar untuk dapat memenuhi ketentuan/*standard* EITI, tetapi bagaimana membawa EITI dan agenda reformasi sektor ekstraktif bersama-sama agar dapat saling menguatkan. EITI harus dapat mempopulerkan dan menguatkan agenda reformasi sektor ekstraktif di Indonesia.
- Standard EITI sebelumnya terbatas dan fokus hanya mengenai transparansi aliran penerimaan (*revenue streams transparency*). Namun, sejak konferensi EITI 2013 di Sydney, terbit standard EITI yang baru yang mencakup seluruh *value chain* dan juga *contextual information*.
- Disadari Indonesia memiliki waktu yang sangat sempit saat ini untuk dapat menyelesaikan Laporan EITI 2012-2013, sehingga ada kemungkinan terjadi keterlambatan dan Indonesia akan mendapat *temporary suspension*. Namun demikian, dalam hal ini Indonesia tidak sendiri. Terdapat beberapa negara lain yang mengalami hal yang sama, sehingga tidak perlu untuk terlalu dikhawatirkan, hal ini dapat dimengerti karena Indonesia masih dalam masa transisi.

B. Persetujuan studi ruang lingkup laporan EITI Indonesia 2012 – 2013

1. Presentasi ringkas (*overview*) Ernst & Young (E & Y) yang merupakan studi ruang lingkup (*scoping study*) Laporan EITI Indonesia 2012-2013.
 - *Milestone* studi yaitu (a) *Kick off meeting* pada 7 Oktober 2014; (b) Presentasi progress report pada 22 Desember 2014 dalam rapat Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif; (c) Penyampaian draft pertama pada 26 Desember 2014; (d) Rapat teknis sub-sektor migas pada 19 Januari 2015 dan sub-sektor mineral dan batubara pada 20 Januari 2015, dan (e) Penyampaian draft kedua pada 23 Januari 2015.
 - *Overview scoping study*. Dalam studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013 sudah diakomodasi standard EITI yang baru (EITI *Standard* 2013) khususnya mengenai *contextual information* yang di dalam Laporan EITI 2010-2011 belum ada, serta adanya perubahan (modifikasi) *template* pelaporan.
2. Tanggapan atas hasil perbaikan studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013.
 - Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan: sudah dilakukan pembahasan atas hasil perbaikan studi dengan stakeholders, meskipun ada sedikit yang masih kurang, tapi sudah **dapat menyetujui**.
 - Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan: perbaikan yang dilakukan sudah mengakomodasi hasil rapat teknis, dan **dapat menyetujui**.
 - Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan: tidak dapat hadir, namun memberikan tanggapan secara tertulis yang menyatakan **komitmen untuk mendukung** penyusunan laporan EITI Indonesia 2012-2013.
 - Ditjen Migas, Kementerian ESDM: tanggapan tertulis sudah disampaikan sebelumnya, scoping yang sekarang sudah jauh lebih baik dari scoping terdahulu, karenanya **dapat menyetujui**. Menjadi tantangan dan perlu kesiapan mitra untuk dapat melaksanakannya.
 - SKK Migas: Dari beberapa kali hasil diskusi dan konsultasi dengan tim teknis termasuk dengan SKK Migas, perbaikan yang dilakukan sudah sangat signifikan, dan **dapat menyetujui**.
 - APBI: Karena perbaikan yang dilakukan sudah sangat baik, **dapat menyetujui**.
 - BPKP: Seluruh isi studi ruang lingkup sudah didiskusikan, scoping study yang sekarang sudah jauh lebih detail, informatif dan transparan, dan **dapat menyetujui**.
 - PT Pertamina: Belum sempat mempelajari perbaikan studi dan memberikan tanggapan tertulis atas draft perbaikan yang di circular, sehingga dianggap **dapat menyetujui**.
 - Ditjen Minerba, Kementerian ESDM: **dapat menyetujui**.
3. Permintaan Klarifikasi
 - Ada permintaan klarifikasi isi studi dari perwakilan Ditjen Migas, Kementerian ESDM terkait *license/kontrak*, pembayaran sosial dan dari CSO terkait akomodasi atas tanggapan tertulis yang sudah disampaikan.

- Disepakati untuk menyelesaikan permintaan klarifikasi tersebut paling lambat pada minggu ke dua Februari 2015.

C. Perkembangan Kegiatan dan Rencana Kerja EITI Indonesia Tahun 2015

1. Revisi Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010;
Pimpinan Rapat menjelaskan alasan perlunya untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif, yaitu:
 - Adanya perubahan nama jabatan (nomenklatur) dan institusi anggota Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif;
 - Adanya perubahan kabinet pemerintahan a.l., ada Kemenko Bidang Kemaritiman yang membidangi Kementerian ESDM (sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
 - Perlunya peningkatan peran aktif *stakeholders* EITI Indonesia sejalan dengan adanya peningkatan standard EITI.
2. Persiapan penyusunan Laporan EITI Indonesia 2012 dan 2013;
 - Disampaikan keterlambatan penyusunan Laporan EITI Indonesia 2012 yang seharusnya terbit paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
 - Surat permohonan perpanjangan waktu penyusunan laporan tersebut dari Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif sudah dikirim melalui surat kepada Ketua Dewan EITI pada tanggal 24 Desember 2014.
 - Memperkuat alasan permohonan perpanjangan waktu tersebut di atas, disebutkan bahwa Indonesia akan menerbitkan Laporan EITI 2012 dan 2013 sekaligus pada bulan Juni 2013.
3. Kemajuan proses pengadaan Administrator Independen Laporan EITI Indonesia 2012 dan 2013.
 - Berdasarkan *timeline* proses pengadaan Administrator Independen (AI) Laporan EITI Indonesia 2012 dan 2013, penandatanganan kontrak kerja AI seharusnya dapat dilakukan pada minggu pertama Februari 2015.
 - Karena keterlambatan proses pengadaan AI tersebut, Clare Short meminta agar pihak Bank Dunia dapat membantu mempercepat pemberian *No Objection Letter* (NOL) AI sesuai permintaan pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

D. Hasil Rapat

1. Seluruh peserta rapat dapat menyetujui studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diklarifikasi dengan anggota Tim Pelaksana dari CSO.
2. Pihak E & Y dan CSO diminta untuk segera dapat menyelesaikan klarifikasi tersebut paling lambat pada minggu ke dua Februari 2015 untuk dapat menghasilkan laporan final studi ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2012-2013.

Mengetahui,
Deputi Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral selaku
Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Montty Girianna